

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abintoro Prakoso, 2005, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo,
- Akhmad Soleh, 2016, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi ; Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, Lkis Pelangi Aksara,
- Andriansyah, 2015, *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*, Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeristas Prof. Dr. Moestopo Beragama,
- C.S.T. Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Dr Haryanto, Haris Iriyanto, 2020, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Media Nusa Creative MNC Publishing,
- Fajar Triyono, 2018, *Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia ( Tujuan Yuridis Empiris Di Wilayah Kota Klaten*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakata,
- Imma Widyawati Agustin and Septiana Hariyani, 2023, *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah* , Universitas : Brawijaya Press,
- Irfan Setiawan and Diva Wira Kusuma, 2023, “*Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Difabel Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah*,” Jurnal Media Birokrasi,
- Ibrahim, Amin, 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Mandar Maju. Bandung
- Peter Mahmud,2013,*Penelitian Hukum*,Kencana, Jakarta,
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Adtya Bakti, Bandung,

### B. JURNAL

- Andryawan Perdana, Budi Santoso, Dhiana Puspitawati, 2021, *Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Atas Penunggakan Pembayaran Iuran Oleh Pemberi Kerja*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 1,
- Ashabul Kahfi, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja* , Jurnal Jurisprudentie Volume 3 Nomor 2,

Benedicta Desca Prita Octalina, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 22,

ch Ardi and Trisna Ros Meidiasari, 2020, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan dengan Pemberian Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan*, Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum, Volume 2, Nomor 2,

Dini Widinarsih, 2019, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 20, Nomor. 2,

ditya Wildan Mahera, Ahmad Sokib, and Muhammad Irfan Zidny, 2023, *“Implementasi Prinsip Kesetaraan Dalam Akses Layanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas,”* Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7, nomor 3,

Fayza Jasmine Oktaferly, 2023, Anis Kumalasari, and Didit Kurniawan Wintoko, *“Peran Infrastruktur Pendukung Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra,”* Journal Of Administrative And Social Science, Volume 4, Nomor 2,

Siti Rahma et al, 2014 , *Penyediaan Transportasi Umum Masa Depan di Kota Semarang*, Jurnal Karya Teknik Sipil Volume 3, Nomor. 1,

Stri Musoliyah, 2019, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*, Sakina: Journal of Family Studies, Volume 3, Nomor 2,

Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol Iv. No. 2. Edisi 2.

Sugi Rahayu dan Utami Dewi, 2013, *Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta*, Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara Volume 1, no. 1,

Fanny Priscillya, 2016, *Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Lex Crimen 5, no. 3

<https://radarjember.jawapos.com/jember/793354885/puluhan-ribu-penyandang-disabilitas-di-jember-belum-mendapatkan-dukunganpenuh-dari-pemerintahan-daerah>, diakses tanggal 10 juli 2024

[Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas - Ombudsman RI](#), diakses 10 juli 2024

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

